

ETIKA KOMUNIKASI ANGGOTA DPRD DALAM MENYAMPAIKAN ASPIRASI MASYARAKAT (Study Di DPRD Provinsi Kalimantan Timur)

Winda¹

Abstrak

Winda, Etika Komunikasi Anggota DPRD Dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Kepada Pemerintahan Di Provinsi Kalimantan Timur dibawah bimbingan Bapak Drs. Sugandi, M.Si dan Ibu Dra. Rita Kalalinggi, M.Si.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui etika komunikasi anggota DPRD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur. Jenis penelitian yang dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, etika komunikasi Anggota DPRD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintahan di Provinsi Kaltim. Kritis, penyampaian aspirasi masyarakat kepada Pemerintahan Provinsi Kaltim selain masa reses, DPRD bertemu dengan konstituen. Rasional. Anggota DPRD bertemu dengan masyarakat, fungsi ini membawakan arus informasi timbal balik dari rakyat kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada rakyat. Teleologis. DPRD menyaring aspirasi masyarakat, antara lain dapat diketahui dari komunikasi yang santun. Universal, secara informal DPRD paling intens mengawal pemekaran wilayah, tetapi DPRD menghindari ada pengrusuhan rumah warga.

Faktor pendukung dari pertemuan anggota dewan dengan konstituen dilakukan ketika masa reses, waktu yang terbatas di setiap resesnya dan DPRD meningkatkan kerja sama dengan lembaga informal masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan dalam berbagai hal yang terkait dengan aspirasi/partisipasi masyarakat. Faktor penghambat dari waktu yang cukup lama dan secara berkelanjutan, masyarakat belum terlalu paham tentang masa reses, ada banyak proses yang harus dilalui oleh sebuah keinginan masyarakat untuk menjadi kebijakan, kurangnya partisipasi masyarakat dan dana yang terbatas dari provinsi Kaltim.

Kata Kunci : *Etika, Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat.*

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : winda168891@yahoo.com

Pendahuluan

Keberadaan lembaga perwakilan rakyat mengandung maksud bahwa rakyat diharapkan ikut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui para wakilnya yang berada di DPRD khususnya Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian kedudukan serta keberadaan lembaga perwakilan rakyat mengundang arti penting dalam memperhatikan kepentingan rakyat yang dirumuskan dalam suatu kebijakan pemerintah sehingga diharapkan timbulnya keterpaduan antara kebijakan yang dirumuskan dengan partisipasi masyarakat secara aktif dan bertanggung jawab. Seperti yang dirumuskan dalam UU No. 12 Tahun 2008, dengan kata lain bahwa DPRD merupakan lembaga yang berperan sekaligus berfungsi sebagai agen perubahan sosial. Parlemen yang merupakan perwakilan dari masyarakat di pilih oleh rakyat, bekerja untuk rakyat, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Dijelaskan pula pada Pasal 45 tentang Anggota DPRD mempunyai kewajiban pada poin h dan i yaitu : Mentaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan sumpah/janji Anggota DPRD dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh penulis diperoleh informasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur didalam tindakan dan perbuatannya harus menyesuaikan dengan norma-norma yang berlaku dalam kebudayaan rakyat yang diwakilinya. Namun pada kenyataannya masih terdapat perilaku anggota DPRD yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak terpuji seperti bahasa yang tidak layak digunakan saat berkomunikasi, sikap dan perilaku yang berlebihan, menguntungkan pribadi dan membebani anggaran rakyat untuk kepentingannya. Dengan memahami etika pemerintahan diharapkan dapat mengurangi tindakan-tindakan yang tercela, tidak terpuji dan merugikan masyarakat, untuk itu perlu kiranya dibuatkan “kode etik” untuk para anggota DPRD yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan peran dan fungsinya, sehingga kewenangan yang besar juga disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Sosok ideal Anggota DPRD yang bermoral, aspiratif dengan kepentingan rakyat, dan selalu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Kuncinya baik eksekutif maupun legislatif harus terjalin komunikasi timbal balik dan adanya keterbukaan diantara para pihak dalam penyelesaian segala permasalahan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk lebih menekankan dan meneliti lebih lanjut mengenai masalah tersebut secara ilmiah melalui skripsi yang berjudul “Etika Komunikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Kepada Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur”.

Kerangka Dasar Teori

Etika

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional di perlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam hubungan komunikasi antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani ETHOS yang berartinorma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik.

Teori Utilitarianisme

Utilitarianisme adalah paham dalam filsafat moral yang menekankan manfaat atau kegunaan dalam menilai suatu tindakan sebagai prinsip moral yang paling dasar, untuk menentukan bahwa suatu perilaku baik jika bisa memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen atau masyarakat. Dalam konsep ini dikenal juga "Deontologi" yang berasal dari kata Yunani "deon" yang berarti kewajiban. Deontologi adalah teori etika yang menyatakan bahwa yang menjadi dasar baik buruknya suatu perbuatan. Perbuatan adalah kewajiban seseorang untuk berbuat baik kepada sesama manusia, sebagaimana keinginan diri sendiri selalu berlaku baik pada diri sendiri.

Memakai teori utilitarianisme karena, teori ini merupakan pendekatan etika. Utilitarianisme : kesudahan yang baik dan yang dihindarkan, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh insan terbanyak. Contoh : DPRD sedang membuat keputusan sama ada janji dengan masyarakat yang menyampaikan aspirasinya. Pertimbangan DPRD : memungkirkan janji menyampaikan aspirasi masyarakat, hanya masyarakat sahaja yang kecewa. Jika aspirasi masyarakat tidak disampaikan di majlis DPRD ramai masyarakat akan kecewa.

Pengertian Etika

Sementara itu Kementerian PAN-RI memberikan definisi etika sebagai nilai-nilai moral yang mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur sikap, tindakan ataupun ucapannya (2006:43).

Etika menurut Abdullah (2006:6), dapat dipakai dalam arti perilaku baik-buruk, boleh-tidak boleh, suka-tidak suka, senang-tidak senang. Etika semacam ini baru diakui apabila perilaku etis asas-asas dan nilai-nilai yang terkandung menjadi ukuran baik-buruk secara umum, diterima masyarakat disuatu tempat menjadi persetujuan bersama dan dilaksanakan bersama.

Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita, dengan demikian etika ini

dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya.

Etika Komunikasi

Etika komunikasi menjadi hal terpenting dalam menjalin hubungan yang baik antar pribadi, organisasi maupun hubungan terhadap pelayanan perusahaan, hubungan baik akan tercipta dengan sendirinya apabila adanya etika komunikasi. Etika komunikasi menjadi sangat penting dalam konteks menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, faktor utama dalam berkomunikasi adalah etika.

Menurut Mufid (2009:185) Dalam berbagai kesempatan, komunikasi diperlihatkan sebagai ilmu yang berhubungan dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang lain. Ini menandakan bahwa komunikasi menyentuh berbagai macam bidang kehidupan manusia. Komunikasi juga menyentuh aspek ilmu dalam bidang komunikasi. Apa yang terjadi apabila nilai, gagasan, dan ide komunikasi justru tidak dikomunikasikan.

Menurut Drs. Sidi Cjajalba dalam Mulyana (2000:42), etika komunikasi adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi di suatu masyarakat.

Komunikasi etis bukan hanya serangkaian keputusan yang cermat dan reflektif, satu demi satu untuk berkomunikasi dengan cara-cara yang bertanggung jawab secara etis. Penerapan kaidah-kaidah etika secara berhati-hati kadang-kadang tidak mungkin dilakukan.

Kode Etik

Menurut Rumanti (2002:295), kode etik merupakan aturan-aturan susila yang ditetapkan bersama dan ditaati bersama oleh seluruh anggota yang bergabung dalam satu profesi, jadi kode etik merupakan persetujuan bersama yang timbul secara murni dari diri pribadi para anggota. Kode etik merupakan serangkaian peraturan yang disepakati bersama guna menyatakan sikap atau perilaku para anggota profesi.

Sedangkan Cutlip, (2005:144) mengatakan kode etik sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang menjadi norma perilaku. Membangun etika perilaku tersebut idealnya sesuai dengan kode etik yang formal dan diakui secara profesional berdasarkan cara pelaksanaannya (*how to law enforcement*) dan penerapan sanksinya (*what is santions*) jika terjadi pelanggaran dalam praktiknya. Herimanto, (2007:253) mengatakan bahwa kode etik lebih meningkatkan pembinaan para anggota sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kode etik dilaksanakan oleh pribadi-pribadi yang memiliki profesi terkait karena hal tersebut melekat pada jabatannya dan bersifat normatif.

Komunikasi

Komunikasi sebagai suatu proses pengiriman dan penyampaian pesan baik berupa *verbal* maupun *non verbal* oleh seseorang kepada orang lain untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tidak langsung melalui media. Komunikasi yang baik harus disertai dengan adanya jalinan pengertian antara kedua belah pihak (pengirim dan penerima), sehingga yang dikomunikasikan dapat dimengerti dan dilaksanakan.

Pengertian Komunikasi

Komunikasi pada hakikatnya adalah sebuah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Menurut Effendi (2003:28), pesan komunikasi terdiri dari dua aspek, *pertama* : isi pesan dan *kedua* : lambang. Tujuan dari komunikasi itu sendiri yaitu, mengubah sikap, mengubah opini, mengubah perilaku, dan mengubah masyarakat. Dalam perkembangannya, komunikasi juga memiliki fungsi tersendiri yaitu: menginformasikan, mendidik, menghibur dan untuk mempengaruhi.

Komunikasi menurut West dan Turner, pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin hidup tanpa berkomunikasi dengan orang lain, adanya interaksi antar sesama manusia dan fakta bahwa komunikasi adalah sebuah proses yang terus menerus dan tidak ada akhirnya menandakan komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia (West and Turner, 2007:5).

Menurut Rogers (dalam Narwoko, 2007:19). seorang pakar sosiologi Pedesaan Amerika membuat definisi “Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi terhadap satu sama lain yang pada gilirannya akan tiba saling pengertian”.

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses atas suatu pertukaran suatu pesan atau informasi kepada seseorang atau pada masyarakat. Sedangkan dapat diartikan manajemen komunikasi adalah proses penggunaan berbagai sumber daya komunikasi secara terpadu melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan unsur-unsur komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Fungsi dan Tujuan Komunikasi

Menurut Hasan (2005:22), menyebutkan komunikasi dikatakan memiliki peran dominan dalam kehidupan manusia, sehingga fungsi komunikasi adalah mencapai tujuan peran tersebut, yaitu antara lain :

1. Mencapai pengertian satu sama lain.
2. Membina kepercayaan.
3. Mengkoordinir tindakan.
4. Merencanakan strategi
5. Melakukan pembagian pekerjaan.
6. Melakukan aktifitas kelompok.

7. Berbagi rasa.

Fungsi lain yang dilakukan oleh komunikasi berhubungan dengan perannya dalam mempermudah pengambilan keputusan. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan memperhatikan data guna mengenali dan menilai pilihan-pilihan alternatif.

Robins (dalam Hasan 2005:23) mensyaratkan bahwa komunikasi memiliki empat fungsi utama dalam suatu organisasi atau dalam kelompok tertentu, yaitu :

1. Fungsi pengawasan.
2. Fungsi motivasi.
3. Fungsi pengungkapan emosional.
4. Fungsi informasi.

Fungsi Komunikasi tersebut diatas merupakan bagian integral dan fungsi organisasi dan apabila masuk pada bidang pemerintahan, fungsi tersebut ditambah dengan adanya pemberdayaan, oleh sebab itu danya kemampuan aplikatif dalam mengoperasionalisasikan urusan-urusan pemerintahan.

Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi diantara seseorang dengan paling kurang seorang lainnya atau biasanya di antara dua orang yang dapat langsung diketahui balikkannya. (Muhammad, 2005:158)

Menurut Mulyana (2007:3) menyatakan bahwa “komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi yang hanya dua orang, seperti suami istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru, murid dan sebagainya”.

Jadi menurut peneliti, komunikasi interpersonal adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau lebih, dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Komunikasi interpersonal ini merupakan komunikasi yang paling efektif karena *feedback* cepat diberikan, jika berlangsung tatap muka dapat melihat komunikasi non verbal dari komunikan. Komunikasi interpersonal sangat berpengaruh dalam organisasi kerana karyawan dengan atasan akan menggunakan komunikasi interpersonal untuk mempelancar aliran komunikasi antara atasan dan bawahan (*downward communication*) ataupun sebaliknya (*upward communication*).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat atau sering disebut dengan parlemen, kata parlemen berasal dari kata “*parle*” yang berarti bicara, daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintahan daerah lainnya.

Seperti yang tertuang dalam UU no.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan tempat untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila yang secara artificial dalam era

reformasi ini telah mengalami pergeseran, baik dalam peran maupun fungsi eksekutif cukup dominan bahkan fungsi legislatif pun diperankan oleh eksekutif. Seperti ditegaskan oleh Miriam Budiarto “telah menjadi gejala umum bahwa titik berat dibidang legislatif telah bergeser ketangan eksekutif” (Miriam Budiarto, 1994:299).

Pada Pasal 40 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 disebutkan bahwa “DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah”. Dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 juga dijelaskan bahwa DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk wilayah provinsi maka disebut DPRD provinsi dan untuk wilayah Kabupaten/Kota maka disebut dengan DPRD Kabupaten/Kota.

Aspirasi Masyarakat

Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut.

Aspirasi adalah harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang (Gunawan, 2003:53). Aspirasi menunjukkan pada kerinduan akan hal yang lebih baik atau tinggi tingkatnya dengan tujuan mencapai kemajuan tertentu (Adi, 2002:299).

Masyarakat berasal dari bahasa ‘arab’ yaitu ‘*musyarak*’. Masyarakat memiliki arti sekelompok orang yang membentuk sebuah system semi tertutup atau terbuka.

Menurut Soekanto (2007:26) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan berkerja cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka suatu kesatuan sosial dengan batasan-batasan yang dirumuskan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa aspirasi masyarakat adalah usulan yang diinginkan dan diharapkan masyarakat menuju kepada kehidupan yang jauh lebih baik.

Definisi Konsepsional

Etika komunikasi anggota DPRD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur adalah pola-pola yang digunakan secara baik dan benar melalui proses atas suatu pertukaran suatu pesan atau informasi anggota DPRD dalam menyampaikan usulan yang diinginkan dan diharapkan masyarakat menuju kepada kehidupan yang jauh lebih baik dengan tata cara utilitarianisme dengan ciri-ciri secara kritis, rasional, teleologis dan universal, yang bertujuan untuk menjaga kepentingan seorang Anggota Dewan dengan masyarakat agar merasa senang, tenang, terlindungi tanpa ada pihak yang dirugikan kepentingannya dan perbuatan yang di lakukan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dipemerintahan serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia secara umum kepada pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

Fokus Penelitian

Untuk mengetahui secara jelas mengenai indikator-indikator yang akan diukur, maka perlu merumuskan definisi operasional dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kritis.
2. Rasional.
3. Teleologis.
4. Universal.
5. Faktor pendukung dan penghambat anggota DPRD dalam pelaksanaan penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur.

Sumber Data

Sumber data ada dua jenis yaitu:

1. Sumber Data Primer
Data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli, sebagai berikut :
 - a. *Key informan* (Informasi Kunci) nya yaitu Seketaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Informannya yaitu Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM, Ketua Komisi II Bidang Keuangan dan Perekonomian, Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Ketua Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Sumber Data Sekunder
Pada penelitian ini penulis memperoleh data melalui dokumen-dokumen yang berasal dari data yang dimiliki oleh kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur dan buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang relevan dengan dengan fokus penelitian.

Tehnik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*).
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), darinya penulis langsung mengadakan penelitian lapangan dengan mempergunakan beberapa cara yaitu : Observasi, Dokumen Research dan Wawancara.

Tehnik Analisis Data

Analisa data kualitatif terdiri dari 4 komponen, antara lain:

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Penelitian

Penulis melakukan penelitian yang dilaksanakan dikantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur kota Samarinda dan keterangan mengenai empat komisi dengan Bidang masing-masing yang berada pada DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Kota Samarinda

Kota Samarinda memiliki luas wilayah sebesar 718 Km². Seiring dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Samarinda ditetapkan sebagai kota, dilakukan pemekaran administrasi pemerintahan, sehingga saat ini terbagi menjadi 6 Kecamatan dan 53 Kelurahan. Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa ini memiliki Visi mewujudkan Kota Samarinda sebagai kota jasa, industri, perdagangan, dan pemukiman yang berwawasan lingkungan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat atau sering disebut dengan parlemen, kata parlemen berasal dari kata "*parle*" yang berarti bicara, daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintahan daerah lainnya. Dokumen lain menyebutkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur baru terbentuk pada tanggal 1 Januari 1957. Patokan yang dipakai adalah sejak tahun baru 1957 itulah pertama kali terisi adanya pemimpin pemerintahan Provinsi, yakni mantan Residen A.P.T. Pranoto telah menduduki atau diangkat menjadi pejabat Gubernur, dengan istilah Acting Gubernur.

Pembahasan

Pembahasan

Dengan hasil perolehan data primermengenai etika komunikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur yang dikaji dari aspek-aspek kritis, rasional, teleologis, universal, faktor pendukung dan penghambat anggota DPRD dalam pelaksanaan penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan hasil perolehan data primer akan dibahas

yang terdiri dari indikator-indikator dan akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut :

Kritis.

Penyampaian aspirasi masyarakat kepada Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timurselain masa reses, DPRD Provinsi Kalimantan Timur bertemu dengan konstituen, ada masa musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan, maupun pada tingkat kota. Setelah mendapatkan aspirasi pada saat reses, anggota dewan akan mengawal aspirasi masyarakat pada tingkat musrenbang. Anggota dewan akan dilibatkan pada musrenbang Kelurahan, Kecamatan, dan tingkat kota. Aspirasi masyarakat akan dibahas pada tingkat musrenbang yang kemudian akan dilanjutkan oleh panitia anggaran eksekutif dan legislatif yang akan dibahas menjadi RAPBD yang kemudian akan menghasilkan APBD berdasarkan hasil rapat secara bersama.

Pelaksanaan komunikasi politik DPRD, dilakukan dengan cara berdialog secara langsung dalam musyawarah. Dalam satu ruangan DPRD membicarakan tentang bagaimana aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, agar DPRD Provinsi dapat merealisasikan kemauan mereka. Salah satu permintaan masyarakat meminta anggota dewan memperhatikan pendidikan dan tata kelola lingkungan di Kota Samarinda. Komunikasi yang dilakukan anggota DPRD dengan konstituen berupa dialog. Anggota dewan mengadakan pertukaran informasi secara langsung dengan tatap muka, sehingga aspirasi yang didapat merupakan aspirasi langsung yang diterima oleh anggota dewan. Dalam dialog tema yang diangkat seputar tentang pembangunan. Masyarakat menginginkan hasil dari pertemuan reses itu adalah sebuah kebijakan tentang persoalan yang masyarakat hadapi.

Masyarakat menginginkan anggota dewan merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat dengan melihat langsung apa yang menjadi kendala di tengah masyarakat. Yang menjadi catatan penting ketika DPRD turun ke lapangan adalah bagaimana anggota dewan bisa melihat permasalahan-permasalahan seperti penggunaan dana bergulir, pendidikan serta sarana dan prasarana daerah.

Rasional.

Ketika anggota DPRD bertemu dengan masyarakat, seorang wakil rakyat harus arif melihat situasi dilapangan. Masyarakat biasanya membuat kegiatan yang di dalamnya memerlukan uluran dana dari para donatur. Sebagai seorang wakil rakyat tidak etis rasanya kalau tidak menyumbang. Padahal tidak ada dana tunai bagi masyarakat dari pihak pemerintah daerah yang melalui pos keuangan DPRD. Tetapi DPRD meninjau, apakah tindakan masyarakat berguna atau tidak bagi masyarakat.

Etika komunikasi sering terpinggirkan, karena etika berkomunikasi belum membudaya sebagai urat nadi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperti halnya bernafas, banyak orang beranggapan bahwa komunikasi sebagai sesuatu

yang otomatis terjadi, sehingga orang tidak tertantang untuk belajar berkomunikasi secara efektif dan beretika. Hal yang paling penting dalam komunikasi, bukan sekadar pada apa yang dikatakan, tetapi pada karakter kita dan bagaimana kita mentransfer pesan serta menerima pesan.

DPRD tidak boleh salah dalam menyampaikan pendapat dan tuntutan tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Manusia akan berpikir dan menimbang, apakah perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan harkat kemanusiannya atau justru sebaliknya. Etika merupakan kajian tentang bagaimana seharusnya manusia itu berbuat, apakah perbuatan itu baik dan buruk. Sebagai salah satu kajian dari filsafat, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak.

Teleologis.

Etika berkomunikasi dalam kebijakan yang DPRD saring berdasarkan aspirasi masyarakat, antara lain dapat diketahui dari komunikasi yang santun. Hal ini merupakan cerminan dari kesantunan kepribadian anggota DPRD. Komunikasi akan lebih bernilai positif, jika para peserta komunikasi mengetahui dan menguasai teknik berkomunikasi yang baik dan beretika. Hal ini merupakan pandangan masyarakat ke DPRD, mengenai fungsi DPRD bagi masyarakat dalam penyaluran aspirasi mereka, DPRD sudah melakukan dengan baik.

Salah satu aspirasi masyarakat, masa reses DPRD dengan melakukan kunjungan ke lapangan dari penerimaan aspirasi masyarakat, tidak hanya untuk bertemu dengan konstituennya, melainkan anggota DPRD juga bertemu dengan kader partai. Hal ini merupakan bagian dari menjaring aspirasi dari masyarakat. Pengurus partai biasanya telah mempersiapkan fasilitas bagi DPRD untuk melakukan kegiatan di daerah pemilihan DPRD. Bantuan yang diberikan anggota dewan kepada konstituen ketika reses adalah bantuan dewan yang diambil dariswadaya anggota dewan itu sendiri. Dana yang diberikan kepada masyarakat bukan untuk perorangan, melainkan bantuan untuk beberapa pembangunan, contohnya pembangunan sekolah dan rumah ibadah.

Parlemen menghubungi para pemilih, menyalurkan keluhan-keluhan dan kehendak-kehendak pemilih serta menyuarakan kepentingan mereka dalam sidang-sidang di parlemen maupun dalam bentuk pernyataan-pernyataan politik. Semua aspirasi dari masyarakat merupakan informasi yang berguna bagi pembangunan kota. Namun dalam pelaksanaannya banyak kendala yang membuat semua aspirasi dari masyarakat tidak terpenuhi.

Ada beberapa tahap sebuah aspirasi masyarakat diteruskan untuk menjadi sebuah kebijakan. Anggota DPRD mengisi masa reses dengan melakukan komunikasi politik dengan konstituennya untuk mendapatkan informasi, yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah rencana pembangunan di tingkat kelurahan, kecamatan, dan tingkat kota. Hasil dari reses yang dilakukan anggota DPRD akan diperjuangkan ketika anggota DPRD melakukan penyusunan anggaran dengan pemerintah kota dalam pembahasan Rancangan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Wakil rakyat harus mengetahui benar aspirasi rakyat tentang apa yang di inginkan mereka. Untuk dapat mengetahui secara benar aspirasi atau keinginan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, maka para wakil rakyat harus mengadakan dan melaksanakan mekanisme komunikasi politik secara teratur.

Universal.

DPRD merupakan organisasi netral. Tidak ada perbedaan dari keaktifan partai, tapi DPRD mengakui seluruh partai sangat membantu proses pemekaran ini. Semua komisi DPRD sangat membantu DPRD Provinsi memulai langkah pemekaran ini, bahkan memberikan kesediaannya untuk menyatakan kesetujuannya terhadap pemekaran, sehingga komisi memiliki kesatuan suara untuk membantu dalam menjalankan proses pemekaran Provinsi Kaltim.

DPRD ini kepanjangan tangan dari partai. Ketika anggota lain dan partai sudah mendiskusikan aspirasi mana yang sekiranya memang patut untuk diparipurnakan, DPRD yang di fraksi bertugas untuk menyatukan suara mendukung hal tersebut, seperti dalam hal pemekaran Kalimantan Timur. Meskipun, banyak pula partai lain yang memang mendukung pemekaran ini. Nah tugas DPRD nanti untuk menyetujui yang kemudian DPRD ajukan dari DPRD untuk Bupati dan Walikota menindaklanjuti dengan penerbitan SK Bupati dan Walikota. Nah setelah itu, apapun hasil yang disepakati oleh pemerintah daerah tugas kita dan partai juga untuk menyampaikan informasi tersebut ke masyarakat.

Hal ini sudah menjadi tugas partai setiap ada kesempatan bertemu dengan warga partai DPRD menyisipkan bagaimana pemekaran itu perlu dilakukan, sudah sampai mana proses pemekaran tersebut. Kepentingan politik atau pencitraan itu DPRD terserah bagaimana orang memandang. Yang pasti DPRD sadar DPRD melakukan sesuatu yang benar dan DPRD tidak takut untuk mendukung pemekaran wilayah. Lagi pula masyarakat sekarang sudah cerdas mereka sudah tahu harus memilih pemimpin Kalimantan Timur seperti apa.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Anggota DPRD Dalam Pelaksanaan Penyampaian Aspirasi Masyarakat Kepada Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur.

Faktor pendukungnya, apabila pertemuan anggota dewan dengan konstituen dilakukan ketika masa reses. Waktu yang terbatas dengan hanya 6 hari di setiap resesnya menyebabkan anggota dewan dan masyarakat harus pandai-pandai memanfaatkannya. Karena banyak permasalahan yang timbul ketika reses yang dihadapi baik oleh anggota dewan maupun oleh masyarakat, kesadaran politik masyarakat dan kepercayaan kepada pemerintah, status sosial, status ekonomi, dan lain sebagainya.

Perlunya kegiatan sosialisasi program-program/kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga di bidang masing-masing komisi DPRD Provinsi Kaltim kepada masyarakat secara intensif, sehingga masyarakat mengetahui mekanisme baik hukum maupun administratif tindak lanjut DPRD terhadap aspirasi masyarakat,

meningkatkan kerjasama dengan lembaga informal masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan dalam berbagai hal yang terkait dengan aspirasi/partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas sistem administrasi dan yang lainnya sehingga dapat mendorong kinerja DPRD dalam melaksanakan tugasnya.

Pada saat masa reses, masyarakat belum terlalu paham tentang apa yang mereka butuhkan dan bagaimana realisasi dari keinginan mereka. Ada banyak proses yang harus dilalui oleh sebuah keinginan masyarakat untuk menjadi kebijakan. Salah satunya adalah pelaksanaan reses oleh anggota dewan untuk menjaring aspirasi masyarakat yang akan diteruskan menjadi sebuah kebijakan, kesibukan anggota DPRD dan masyarakat yang majemuk juga menjadi faktor penghambat.

Pada saat pelaksanaan reses anggota dewan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak kecamatan ataupun kelurahan tentang perihal kedatangan mereka. Pihak kecamatan ataupun kelurahan akan mengundang perwakilan masyarakat untuk berdialog dengan masyarakat tanpa menutup pada masyarakat yang lain untuk hadir. Sosialisasi telah dilakukan oleh anggota dewan namun pada pelaksanaannya masyarakat yang hadir kurang dari yang diharapkan. Kurangnya partisipasi masyarakat ketika reses diakibatkan karena kekecewaan masyarakat itu sendiri terhadap anggota dewan. Beberapa kali telah diadakan reses untuk menjaring aspirasi masyarakat namun pelaksanaan dari hasil reses tersebut sangat minim yang dilakukan oleh anggota dewan, dana yang terbatas dari Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai wakil rakyat DPRD harus pandai dalam berbagi waktu agar dapat berkomunikasi yang baik dengan masyarakat. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dari persiapan di daerah pemilihan membuat aktivitas komunikasi politik sedikit terganggu. Dana yang diperlukan guna menunjang perlengkapan berasal dari swadaya anggota dewan. Dalam penyaluran aspirasi masyarakat, ada anggota DPRD yang tidak menghiraukan aspirasi masyarakat yang disampaikan.

Penutup

Kesimpulan

Dari hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Etika komunikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :
 - a. Etika komunikasi secara kritis dalam penyampaian aspirasi masyarakat kepada Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur selain pada saat masa reses, DPRD bertemu dengan konstituen, ada masa musyawarah rencana pembangunan baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan, maupun pada tingkat Kota. Setelah mendapatkan aspirasi pada saat reses, DPRD akan mengawal aspirasi masyarakat pada tingkat musrenbang dan mengadakan pertukaran informasi secara langsung dengan tatap muka.

- b. Etika komunikasi secara rasional. Pada saat anggota DPRD bertemu dengan masyarakat, seorang wakil rakyat harus arif melihat situasi dilapangan. Pedoman etika yang berakar dalam nilai-nilai demokrasi, antara lain bahwa komunikator harus menumbuhkan kebiasaan bersikap adil dalam memilih dan menampilkan fakta dan pendapat secara terbuka. Komunikasi politik berfungsi sebagai penyebarluasan rencana-rencana atau kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah kepada rakyat.
- c. Etika komunikasi secara teleologis antara lain dapat diketahui dari komunikasi yang santun. Hal ini merupakan cerminan dari kesantunan kepribadian anggota DPRD. Komunikasi politik merupakan kegiatan untuk menerima atau menyampaikan pesan yang dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijaksanaan dalam rangka menyalurkan aspirasi rakyat, sehingga DPRD dapat berperan dengan baik. Ada beberapa tahap sebuah aspirasi masyarakat diteruskan untuk menjadi sebuah kebijakan.
- d. Etika komunikasi secara universal. Secara informal DPRD Provinsi paling intens mengawal pemekaran wilayah, tetapi DPRD menghindari ada penggusuran rumah warga. DPRD merupakan organisasi netral. Tidak ada perbedaan dari keaktifan partai, tapi DPRD mengakui seluruh partai sangat membantu proses pemekaran. Masyarakat mendengarkan dan menyampaikan aspirasi mereka ini bukan untuk pencitraan semata, tapi karena memang anggota DPRD banyak yang berasal dari Kalimantan Timur, putra daerah Kalimantan Timur.
- e. Faktor pendukung dari pertemuan anggota dewan dengan konstituen dilakukan ketika masa reses, waktu tidak terbatas di setiap resesnya, kesadaran politik masyarakat, perlunya kegiatan sosialisasi program dan kegiatan yang dilakukan juga dibidang masing-masing komisi DPRD Provinsi Kaltim kepada masyarakat secara intensif, DPRD meningkatkan kerjasama dengan lembaga informal masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan dalam berbagai hal yang terkait dengan aspirasi/partisipasi masyarakat, peningkatan kualitas sistem administrasi, memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan pola-pola penyerapan aspirasi masyarakat yang digunakan selama ini, tidak mengacu pada aturan dan kaidah hukum yang berlaku, namun menggunakan berbagai cara yang dinilai cukup efektif.
- f. Faktor penghambatnya dari penjangkaran aspirasi masyarakat membutuhkan waktu yang lama, masyarakat belum terlalu paham tentang pada saat masa reses, ada banyak proses yang harus dilalui oleh sebuah keinginan masyarakat untuk menjadi kebijakan, kurangnya partisipasi masyarakat, sosialisasi pada saat pelaksanaan reses, tidak dilakukan oleh DPRD, pada pelaksanaannya masyarakat yang hadir kurang dari yang diharapkan, reses beberapa kali telah diadakan untuk menjaring aspirasi masyarakat namun pelaksanaan dari hasil reses tersebut sangat minim yang dilakukan oleh DPRD, dana yang terbatas dari provinsi Kaltim, waktu pertemuan dan sarana dan prasarana yang terbatas kurang memadai dari aktivitas komunikasi politik sedikit terganggu dan dana

yang diperlukan guna menunjang perlengkapan berasal dari swadaya anggota DPRD serta ada sebagian anggota DPRD yang tidak mau menerima aspirasi masyarakat.

Saran

Adapun saran-saran yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam penjangkauan aspirasi masyarakat, bisa menggunakan waktu tidak lama, secara berkelanjutan.
2. Bagi masyarakat yang belum paham tentang pada saat masa reses DPRD, sebaiknya DPRD memberikan sosialisasi terlebih dahulu, penyampaian tujuan reses.
3. DPRD Provinsi Kalimantan Timur, menindaklanjuti mengenai dana yang sangat terbatas dari provinsi Kalimantan Timur.
4. Dari komunikasi politik DPRD dengan masyarakat, sebaiknya memperhatikan waktu pertemuan, sarana dan prasarana tidak lagi terganggu dan dana yang diperlukan guna menunjang perlengkapan DPRD.
5. Bagi seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dapat menerima penyaluran aspirasi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Yatimin, 2006, *Pengantar Studi Etika*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hasan, Alwi. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka.
- Herimanto, PC. Bambang, FX. Indrojiono. 2005. *Komunikasi Bisnis*. Yogyakarta : Amara Books.
- Linton, Ralph. 2005. *Antropologi : Suatu Penyelidikan tentang Manusia*. Bandung : Jemars.
- Mufid, Muhammad. 2005. *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*. Jakarta : Kencana.
- Mulyana, Deddy, 2007, *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*, PT. Remaja Rosdakarya : Jakarta.
- Narwoko , J. Dwi dan Suyanto Bagong. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta : Kencana.
- Rumanti, Assumpta Maria. SR. 2002. *Dasar-Dasar Public Relations Teori dan Praktik*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- West, R dan Lynn H. Turner. 2009. *Pengantar Teori Komunikasi : Analisis dan Aplikasi*. Jakarta : Salemba Humanika.